

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Eksistensi suatu bangsa dimata internasional bisa dilihat dari keberhasilannya dalam mengelola pembangunan. Pembangunan nasional suatu bangsa termasuk didalamnya pembangunan ekonomi membutuhkan peran serta lembaga keuangan dalam hal pembiayaan, hal ini karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Lembaga keuangan sebagai salah satu penopang pembangunan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Pada awal Juli 1997 terjadi gejolak terhadap nilai tukar. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan pengetatan likuiditas yang menyebabkan munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Pada periode ini, fungsi pengawasan bank dititikberatkan pada program penyehatan perbankan serta program untuk meningkatkan ketahanan perbankan. Perbankan memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia. Namun bukan hanya di Indonesia, di Negara-negara industri seperti Amerika Serikat dan Inggris perbankan sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan uang. Peranan perbankan sangat penting dalam menghadapi era pasar bebas danglobalisasi yaitu sebagai perantara antara sektor *defisit* dan sektor *surplus* maupun sebagai *agent of development*, namun dalam hal

ini masih dibebankan pada bank-bank umum milik pemerintah (Dedy, 2003). Melalui bank-bank umum ini akan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan. Selanjutnya, dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor bisnis atau pihak-pihak yang membutuhkan lainnya.

Keberadaan perbankan syariah sendiri dimulai pada saat penerbitan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dijabarkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 dimana pemerintah telah memberikan kesempatan dalam pelaksanaan bank syariah. Selanjutnya melalui UU No. 23 Tahun 1999 hingga disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 pemerintah memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menjelaskan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional akan semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Perkembangan yang cukup pesat pun terjadi pada industri perbankan syariah akhir-akhir ini, yang berpengaruh pada lingkungan perbankan nasional. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pendirian Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri dari satu bank pada tahun 1998 menjadi tiga Bank Umum Syariah (BUS), 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), serta bank-bank umum yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank Syariah Di Indonesia

Jenis Bank	1992	1998	2004	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BUS	1	1	3	3	5	6	11	11	11	11
UUS	-	-	15	26	27	25	23	24	24	23
BPRS	-	76	88	114	131	138	150	155	158	160

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia/www.bi.go.id

Bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah mempunyai dua fungsi penting yaitu sebagai *baitul maal wa tamwil* (badan sosial dan badan usaha). Fungsi bank syariah sebagai badan sosial adalah bank syariah sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Sedangkan fungsi bank syariah sebagai badan usaha adalah sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan.

Ascarya dan Diana Yumanita (2005) menjelaskan jenis-jenis kegiatan bank syariah meliputi : menghimpun dana, menyalurkan dana serta sebagai pemberi jasa perbankan. Bank syariah menghimpun dana melalui prinsip *mudharabah* (tabungan, deposito/investasi dan obligasi), prinsip *wadiah yad dhamanah* (giro dan tabungan) serta prinsip *ijarah* (obligasi). Bank syariah menyalurkan dana melalui pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) serta pola sewa (*ijarah*). Bank syariah memberikan jasa keuangan, jasa non-keuangan (*wadiah yad amanah*) dan jasa keagenan (*mudharabah muqayadah*).

Perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pemilik sumber dana dengan pihak yang memerlukan dana, memegang fungsi strategis dalam memajukan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Peran strategis inilah yang menyebabkan kesinambungan usaha suatu bank perlu dipertahankan. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka kesehatan bank perlu dijaga (M. Noor, 2005).

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Kondisi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko (M. Noor, 2005). Untuk menilai apakah suatu bank termasuk kategori bank sehat atau bank sakit maka harus dilihat dari kinerja operasionalnya. Kinerja dapat diukur dengan melihat efisiensi pengelolaan dana bank tersebut. Untuk itu dengan semakin efisien suatu bank maka akan mengindikasikan tingkat kesehatan bank (Priyonggo, 2004).

Kegiatan operasional perbankan mengakibatkan biaya operasional, menghasilkan pendapatan operasional dan melibatkan aktiva dalam prosesnya. Kegiatan operasional ini perlu suatu proses identifikasi, pengukuran, analisis, penyiapan dan komunikasi informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu perusahaan, serta untuk menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber dan pertanggungjawabannya.

Efisiensi industri perbankan merupakan parameter kinerja yang cukup banyak digunakan. Pengukuran efisiensi ini banyak digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan. Perhitungan tingkat keuntungan perusahaan biasanya digunakan untuk menunjukkan hasil kinerja yang baik, namun perhitungan ini terkadang tidak masuk dalam kriteria bank sehat dari sisi peraturan Bank Indonesia. Industri perbankan Indonesia adalah industri yang paling banyak diatur oleh peraturan-peraturan dari Bank Indonesia. Pengukuran efisiensi industri perbankan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatannya yaitu *stochastic frontier analysis* (SFA) dan *distribution free analysis* (DFA) (Hadad, 2003). Penelitian ini akan menggunakan metode parametrik dengan menggunakan pendekatan SFA untuk menganalisis tingkat efisiensi dari bank-bank yang terdaftar di Bank Indonesia.

Penilaian efisiensi biaya perbankan didasarkan pada nilai biaya yang dikeluarkan perusahaan perbankan tertentu dibandingkan dengan nilai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan dengan praktik terbaik (*best practicing firm*). Efisiensi biaya diartikan sebagai rasio antara biaya minimum dimana perusahaan dapat menghasilkan sejumlah *output* tertentu, dengan biaya dikeluarkan oleh perusahaan perbankan tersebut. Nilai efisiensi biaya dengan menggunakan metode SFA adalah dalam bentuk persentase. Semakin mendekati 100% menunjukkan bahwa suatu bank bertindak semakin efisien.

Pengukuran efisiensi perbankan Indonesia secara operasional dapat dilihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Salah satu indikator efisiensi perbankan secara operasional dari sisi biaya adalah rasio antara biaya

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin rendah rasio BOPO menunjukkan bahwa bank tersebut sudah melakukan efisiensi dalam pengeluaran biaya-biaya operasionalnya (Sinar Harapan, 2003). Berikut adalah detail dari kinerja perbankan syariah Indonesia periode tahun 2010-2013 :

Tabel 1.2
Efisiensi Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2013

Indikator	2010	2011	2012	2013
BOPO (%)	78,08	76,31	80,02	80,75
-Biaya Operasional	4,472	6,660	8,750	14,021
-Pendapatan Operasional	8,757	12,457	16,939	23,251
FDR (%)	128,47	127,71	120,96	120,93
-Kredit	68,181	102,655	147,505	184,122
-Dana Pihak Ketiga	76,036	115,415	147,512	183,534

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Dari Tabel 1.2 Rasio Biaya Operasional dengan pendapatan operasional (BOPO) dari tahun 2010 sebesar 78,08% turun menjadi 76,31% pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 BOPO mengalami kenaikan menjadi 80,02%. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi Bank Umum Syariah nasional Tahun 2012 masih sangat rendah bila dibandingkan dengan Tahun 2011 jika dilihat dari indikator rasio BOPO. Efisiensi industri perbankan syariah Indonesia masih sangat rendah karena rasio BOPO rata-rata diatas 80%. Industri perbankan syariah Indonesia masih beroperasi tidak efisien dalam penggunaan biaya-biaya operasionalnya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi yang dicapai perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi perbankan syariah.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “ **Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Indonesia Dengan Menggunakan Metode Parametrik *Stochastic Frontier Analysis***”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah berikut ini :

1. Berapa tingkat efisiensi Bank Umum Syariah Indonesia pada periode tahun 2010-2013 berdasarkan pendekatan parametrik ?
2. Apakah Aset Tetap, Simpanan, dan Biaya Tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka dapat di jelaskan tujuan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tingkat efisiensi Bank Umum Syariah Indonesia pada periode 2010-2013.
2. Untuk menjelaskan Aset Tetap, Simpanan, dan Biaya Tenaga Kerja terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan informasi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terutama kinerja yang telah dicapai selama ini.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber bacaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kajian pembelajaran dan pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait perbaikan kinerja oleh perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Manfaat Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, berisi pula

landasan teori yang berkaitan dengan Perbankan Syariah yang mendasari penelitian ini, Kerangka Pemikiran serta Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Rancangan penelitian, Batasan penelitian, Identifikasi penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang Gambaran Subyek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran bagi peneliti selanjutnya.